

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN
2021 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP)**

(Studi Di Dinas Pendidikan Kota Batu)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana

Administrasi Publik



OLEH

FLAVIANA SAIMAN

2019210182

KOMPETENSI KEBIJAKAN PUBLIK

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI

MALANG

2023

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP)

(Studi Di Dinas Pendidikan Kota Batu)

Flaviana Saiman

Program Studi Administrasi Negara, Fakultas FISIP, Universitas Tribhuwana Tunggaladewi
Malang

Email: flavianasaiman@gmail.com

Dosen Pembimbing 1 : Ignatius Adiwidjaja, S.Sos., M.Si

Dosen Pembimbing 2 : Dr. Asih Widi Lestari, S.AP., M.AP

ABSTRAK

Jika dicermati, menciptakan kebijakan publik yang efektif bukanlah prosedur yang mudah dilakukan pemerintah. Menurut UUD 1945, Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan kewenangan kepada daerah untuk memberlakukan otonomi daerah. Pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Faktor mendasar yang menentukan seberapa cepat suatu negara maju adalah mereka memiliki sumber daya manusia(SDM). Oleh karena itu, pemupukan harus dimulai sejak usia muda agar dapat melahirkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul. Salah satunya bekerja di area pendidikan. Nilai kreativitas dan inovasi dalam meningkatkan standar pendidikan dan prestasi akademik. Kota Batu mempunyai permasalahan dengan instruktur, tenaga pendukung, pendanaan, dan infrastruktur terkait pendidikan. Karena jumlah guru yang pensiun setiap tahunnya tidak proporsional dengan jumlah instruktur yang berkualitas, banyak sekolah yang masih kekurangan guru dan tenaga pengajar. Sementara itu, banyak sekolah di Kota Batu yang membutuhkan infrastruktur baru, khususnya ruang kelas, baik dari segi sarana dan prasarana pendidikan (sarpras). Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 mengenai Standar Nasional Pendidikan, serta elemen pendorong dan penghambatnya. Studi ini menggunakan metode kualitatif. Beberapa metode pengumpulan data termasuk observasi, wawancara, dan

dokumentasi. Hasil penelitian dilakukan pada Dinas Pendidikan Kota Batu dikenal bahwa proses pelaksanaan terdiri dari empat (4) komponen: komunikasi yang efektif antara masyarakat dan implementator, ketersediaan sumber daya aparatur yang memadai, penempatan implementator kebijakan yang dapat diterima, dan struktur birokrasi yang sesuai dengan mekanisme pelaksanaan kebijakan. Faktor pendukung ada, seperti komunikasi yang baik dan sumber daya aparatur yang cukup. Faktor penghambatnya adalah, Kurangnya tenaga pengajar atau tidak bisa merekrut guru sejarah di sekolah terkait dengan peraturan yang ada.

Kata Kunci: *Pemerintah, Pendidikan, Implementasi kebijakan, Standar Pembelajaran Nasional*

BAB I

KATA PENGANTAR

1.1 Pendahuluan

Jika dicermati, menciptakan kebijakan publik yang efektif bukanlah prosedur yang mudah dilakukan pemerintah. Kelompok yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan peraturan perundang-undangan di suatu daerah disebut pemerintah. Pemerintah adalah suatu lembaga yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur suatu masyarakat politik, wewenang untuk mengatur suatu kesatuan politik, aparatur yaitu badan pemerintahan yang berfungsi dan menjalankan kekuasaan, wewenang untuk menetapkan peraturan perundang-undangan, kemampuan untuk menyelesaikan masalah, konflik dan terlibat dalam pengambilan keputusan administratif, dan monopoli kekuasaan sah.

Menurut Undang-undang Dasar 1945, daerah diberi otoritas untuk menerapkan otonomi daerah dalam struktur pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah daerah diatur dalam Pasal 1 angka 3 undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Pemerintah didirikan dengan tujuan melindungi sistem keteraturan masyarakat yang berorientasi pada tujuan dan pemerintah bukan hanya sebatas melindungi, tetapi juga bertindak sebagai perwakilan masyarakat.

Efektivitas pendidikan di Indonesia dapat ditingkatkan sebagian besarnya dengan memiliki sistem pendidikan yang kuat. Yang juga sangat menyedihkan adalah perubahan pada sistem pendidikan kita membingungkan guru dan murid. Standarisasi pengajaran yang kami terima adalah topik lain yang kami diskusikan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Wajar saja setelah dilakukan prosedur untuk menetapkan kriteria yang akan digunakan. Lanskap pendidikan selalu berkembang. Keterampilan yang dibutuhkan oleh masyarakat terus berkembang, khususnya dalam lingkungan terbuka di era globalisasi saat ini.

Harus dipenuhi standar kompetensi yang harus dimiliki oleh pelamar lembaga pendidikan (Nurhada. H, 2022).

Pendidikan yang efektif adalah pendidikan yang memungkinkan siswa belajar dengan cepat, menikmati diri mereka sendiri, dan mencapai tujuan mereka. Oleh karena itu, perlu bagi para pendidik (guru, instruktur, dosen, dan pelatih) untuk memperbaiki efektivitas pembelajaran agar dapat bermanfaat. Di Indonesia, pendidikan dalam sekolah hanya sedikit efektif. Kurangnya tujuan pendidikan yang jelas sebelum pelaksanaan kegiatan pembelajaran menjadi salah satu penyebabnya, menurut penelitian lapangan dan survei yang dilakukan oleh para praktisi pendidikan. Akibatnya, baik siswa maupun guru tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang proses pendidikan karena mereka tidak yakin dengan “tujuan” yang akan dicapai. Jelaslah, jika kita menginginkan pengajaran yang berhasil, ini adalah persoalan yang paling krusial. Jika kita tidak tahu apa tujuan kita, bagaimana kita bisa mencapainya. Banyak pandangan yang saat ini berpendapat bahwa institusi pendidikan formal hanya dipandang sebagai standar untuk mengembangkan sumber daya manusia negara. Yang terpenting adalah Anda telah menyelesaikan sekolah pada tingkat yang tinggi dan dapat dianggap luar biasa oleh masyarakat, apa pun hasil pembelajaran formalnya. Selain itu, anggapan semacam ini berkontribusi pada rendahnya tingkat efektivitas pengajaran di Indonesia. Setiap orang mempunyai kelebihan di bidangnya masing-masing, diharapkan dapat menempuh pendidikan sesuai dengan keahlian dan passionnya, bukan hanya dikagumi orang lain (Rosalini.I, 2022).

Memang benar, komponen kunci dalam meningkatkan sumber daya manusia Indonesia untuk pertumbuhan nasional adalah pendidikan. Oleh karena itu, kita harus mampu meningkatkan sumber daya manusia Indonesia agar mampu rival dengan negara lain. Selama ini tampaknya pendidikan formal dan informal hanya mementingkan standar dan kompetensi saja. Standar dan kompetensi dalam berbagai bentuk digunakan untuk mengukur mutu pendidikan, sehingga dibentuklah organisasi terbaru untuk menerapkan standar dan keahlian

ini, seperti Badan Standar Pendidikan Nasional (BSPN). Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap buruknya standar pendidikan di Indonesia tidak hanya terbatas pada faktor-faktor yang telah kami bahas. Sistem pendidikan kita di bawah standar karena ada sejumlah alasan. Tentu saja, jika kita melihat lebih dekat penyebab masalahnya, kita bisa menemukan hal-hal seperti itu. Dan mungkin jika kita tahu sumber masalahnya, kami bisa mengubah sistem pendidikan negara menjadi lebih baik (Rahmat Stephanus, 2018).

Tidak diragukan lagi, pendidikan memiliki peran besar dalam membentuk karakter bangsa Indonesia. Institusi pendidikan dapat berfungsi sebagai benteng terakhir di mana prinsip anti korupsi disebar. Untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan baik (clean and good governance) untuk masa depan, pendidikan harus menjadi pilar paling depan untuk mencegah korupsi. Pendidikan adalah cara utama untuk meningkatkan sumber daya manusia agar mereka dapat memaksimalkan potensi mereka dan mengelolanya dengan bijak. Hal ini sesuai dengan tujuan utama pendidikan nasional, yaitu mewujudkan sistem pendidikan untuk meningkatkan pranata sosial yang kuat sehingga mampu memberdayakan masyarakat Indonesia yang berkualitas tinggi untuk proaktif memecahkan tantangan zaman yang berubah-ubah (Suastika Nengah, 2022).

Kebijakan pendidikan merupakan komponen kebijakan publik yang secara langsung dibuat oleh entitas tertentu. Proses implementasi kebijakan pendidikan sangat penting karena tahap ini menentukan apakah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan benar. Pendidikan dapat dilakukan selama tahap evaluasi untuk digunakan kembali kebijakan yang diterapkan. Selain itu, proses implementasi kebijakan pendidikan juga diperhatikan. Menurut Ki Hajar Dewantara (dalam Teguh Triwiyanto(2017:61), pendidikan (termasuk pengajaran) bagi setiap bangsa berarti pemeliharaan untuk mengembangkan benih keturunan bangsa agar dapat berkembang dengan sehat lahir batin. Untuk mencapai hal ini, orang harus mendidik jiwa dan tubuh mereka dengan menggunakan semua alat pendidikan yang didasarkan pada adat istiadat.

Di Indonesia, terdapat beberapa bentuk pendidikan, baik sekolah formal maupun informal. Pendidikan formal mencakup pengajaran yang memungkinkan pencatatan dan integrasi seluruh bagian pendidikan saat ini dengan pemerintah. Dikatakan pula bahwa Pendidikan formal dimulai di tingkat SD, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA, dengan jalur pendidikan yang terorganisir dan berjenjang. Di sisi lain, pendidikan nonformal bertujuan untuk memperluas pemahaman manusia dan biasanya digunakan untuk membantu atau melengkapi pendidikan formal (Husti, 2022).

Eksekusi kebijakan itu sendiri merupakan puncak dari berlarut-larutnya proses suatu proses kebijakan. Pada kenyataannya, proses pemberlakuan suatu kebijakan baik di bidang kebijakan maupun di bidang kebijakan lainnya adalah hal yang paling penting pada akhirnya. Hal ini menunjukkan bahwa betapapun efektifnya formulasi kebijakan dan formulasi yang dikembangkan, jika formulasi tersebut tidak ditindaklanjuti dengan proses implementasi maka akan menjadi sia-sia. Jadi, betapapun lugasnya hal tersebut, rumusan dan formulasi kebijakan akan berguna jika dipraktikkan.

Di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah persyaratan minimal untuk sistem pendidikan. Demi mewujudkan pendidikan di seluruh negara yang bermutu, standar nasional pendidikan dijadikan sebagai landasan perancangan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan. Tujuan dari standar nasional untuk melindungi kualitas pendidikan yang diselenggarakan sehingga masyarakat negara dapat terdidik dan mengembangkan karakter dan peradaban bangsa yang terhormat (Alawiyah, F, 2017).

Faktor mendasar yang menentukan seberapa cepat suatu negara maju adalah sumber daya manusianya. Oleh sebab itu, pemupukan harus dimulai sejak usia muda agar dapat melahirkan sumber daya manusia terbaik di Indonesia. Di area pendidikan salah satunya. Nilai kreativitas

dan inovasi dalam meningkatkan standar pendidikan dan prestasi akademik. Perlu ditumbuhkan gagasan dan kerjasama antar komite dan sekolah. Apa yang menjadi masalah harus segera dinilai dan diperbaiki. Kota Batu mempunyai permasalahan dengan instruktur, tenaga pendukung, pendanaan, dan infrastruktur terkait pendidikan. Karena jumlah guru yang bekerja tidak sebanding dengan jumlah guru yang pensiun setiap tahun berkualitas, banyak sekolah masih kekurangan guru dan staf pengajar. Sementara itu, banyak sekolah di Kota Batu yang membutuhkan infrastruktur baru, khususnya ruang kelas, baik dari segi sarana dan prasarana pendidikan (sarpras).

Berdasarkan pembahasan diatas , maka mendorong penulis untuk mengangkat judul **“Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kota Batu menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Pendidikan Nasional?
2. Faktor pendukung dan penghambat apa yang dimiliki pemerintah kota Batu terkait Standar Pendidikan Nasional ?

1.3 Tujuan

1. Untuk mengetahui tentang pelaksanaan kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Pendidikan Nasional
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang dimiliki pemerintah kota Batu terkait Standar pendidikan nasional.

1.4 Manfaat

Dengan tercapainya tujuan penelitian ini dengan baik maka Manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Akademis

Diharapkan penelitian ini akan membantu peneliti dan pemerintah melaksanakan implementasi kebijakan publik tentang standar nasional pendidikan.

b. Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan ide bagi pelaksanaan khususnya mengenai Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 mengenai Standar Nasional Pendidikan
2. Diharapkan bahwa penelitian ini akan meningkatkan pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan penelitian dan penyusunan karya ilmiah bagi penulis sendiri..

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin. 2008. *Religijs IPTEK*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Agustino,Leo.2012 . *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung:Alfabeta
- Anggara,Sahya.2014. *Kebijakan Publik*.Bandung : CV.Pustaka Setia
- Awan & Yudi. 2016 . *Teori Dan Analisis Kebijakan Publik* .Bandung : Alfabeta
- Faiz,Aiman . 2021 . *Faktor Penghambat Pendidikan* , Jurnal.Cirebon : Muhammadiyah Universitas Indonesia
- Hasan, Erlina. 2005 . *Komunikasi Pemerintahan*. Bandung:PT. Refika
- <https://dindik.batukota.go.id/layanan/>
- https://pskp.kemdikbud.go.id/standar_pendidikan/snp
- Lestari, F.A. 2019. *Jurnal Implementasi Kebijakan Pendidikan Dalam Program Bantuan Operasional Sekolah*. Malang
- Moleong, Lexy.J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung:PT.Remaja Rosdakarya
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Pendidikan Nasional
- Setyawan, Dody. 2017. *Pengantar Kebijakan Publik*. Malang : Intelgensia Media
- Sugiyono . 2017 . *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif , dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Tanzeh, Ahmad .2009 . *Pengantar Metode Penelitian* .Yogyakarta : Teras
- Triwiyanto, Teguh . 2017 . *Pengantar pendidikan* . Jakarta : Bumi Aksara

UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas)

Winarno, Budi . 2002 . *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Presendo .

Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik*. Jakarta:Pt. Buku Kita

Jurnal:

Lestari,F.A(2019 Implementasi Kebijakan Pendidikan Dalam Program Bantuan Operasional Sekolah Di UPT Dinas Pendidikan (Studi Kasus Di Kota Malang). Jurnal Ilmiah, diakses dari <https://jurnal.iainbone.ac.id/index.php/mappesona/article/download/1809/960>